



UNIVERSITAS WIRARAJA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : lppm@wiraraja.ac.id Website : lppm.wiraraja.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 068/SP.HCP/LPPM/UNIJA/VI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anik Anekawati, M.Si
Jabatan : Kepala LPPM
Instansi : Universitas Wiraraja

Menyatakan bahwa :

- Nama : Imam Hidayat, M. AP.
Jabatan : Staf Pengajar Fakultas Ilmu Administrasi Publik

Telah melakukan cek plagiarisme ke LPPM menggunakan *software turnitin.com* untuk artikel dengan judul "*Membedah Urgency Isu Dugaan Penyalahgunaan Gerakan People Power (Sejumlah Tokoh) Terhadap Ketidak Puasan Kinerja KPU Pada Pemilu Tahun 2019*" dan mendapatkan hasil similarity sebesar 9%

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan dengan sebaik-baiknya.

Sumenep, 16 Juni 2020



Anik Anekawati, M.Si

NIDN. 0714077402

Cek Plagiasi 15-06-2020

by Imam Hidayat 2

Submission date: 15-Jun-2020 12:43PM (UTC+0700)

Submission ID: 1344044609

File name: kinerja_KPU.docx (578.41K)

Word count: 6255

Character count: 40843

Membedah Urgency Isu Dugaan Penyalahgunaan Gerakan *People Power* (Sejumlah Tokoh) Terhadap Ketidakpuasan Kinerja KPU Pada Pemilu Tahun 2019

Imam Hidayat

Email : imamhidayat@wiraraja.ac.id
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wiraraja

Abstrak

Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituntut untuk menghasilkan pemilu yang jujur dan adil sehingga cita-cita dari demokrasi yang menyentuh semua lapisan publik dapat terwujud yaitu melalui indikator kinerja birokrasi sebagai materi dalam menentukan sikap dan menilai apakah kinerja KPU sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan dan pengetahuan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab permasalahan dari indikator kinerja Komisi Pemilihan Umum sehingga membuka wawasan cakrawala bagi penulis dan pembaca dengan tidak terprovokasi atas ajakan *People power* (sejumlah toko) yang akhir-akhir ini menjadi isu utama dalam publik Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang selanjutnya dianalisa dengan analisis kualitatif yaitu mengenai fenomena ajakan *People power* kemudian dicarikan solusi dengan memahami teori kinerja dari beberapa materi dan sumber yang dikemukakan oleh Dwiyanto, 2009:228-229 tentang kinerja birokrasi yang meliputi Produktivitas, Kualitas pelayanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas.

Hasil penelitian yang didapatkan yaitu berdasarkan focus penelitian diantaranya Produktivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum sangat baik, Kualitas pelayanan kinerja Komisi Pemilihan Umum mengutamakan kepentingan public, Responsivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ada, Responsibilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum dilakukan dengan prinsip yang benar, Akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum memberikan informasi sejelas - jelasnya kepada publik.

Keyword : Isu ajakan *People power*, Indikator kinerja Komisi Pemilihan Umum

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini publik Indonesia sedang dihadapkan pada konflik bangsanya sendiri, kegaduhan dari pusat sampai tingkat bawah menciptakan isu kontroversial, persial namun tersistematis dan gerakan yang massif, maka tidak heran jika banyak ditemukan bangunan narasi opini yang membentuk persepsi yang berbeda-beda dari setiap masing-masing individu, kelompok masyarakat (organisasi masyarakat, organiasi kepemudaan) dan organisasi publik lainnya.

Pengertian dari publik merupakan kelompok yang melibatkan orang-orang untuk melakukan aktifitas komunikasi dari sebuah oragnisasi, baik secara internal maupun eksternal (Jefkins, 2005), yang secara sadar mereka bertindak dari titik tertentu ketitik tertentu lainnya. Sehingga, membentuk pola gerakan yang dinamis yang melahirkan tindakan kontroversial antar masyarakat satu dengan lainnya yang terus terjadi secara terus menerus.

Dinamisnya pemikiran kemajemukan kelompok jika dilihat dari fungsi positifnya maka akan membentuk sebuah partisipasi masyarakat sebagai pembelajaran yang signifikan bagi salah satu tindakan kemajuan dari pembangunan nasional serta menghayati pengalaman tentang kedewasaan berdemokrasi. Namun, jika dilihat dari fungsi negatif dari pemikiran kemajemukan kelompok akan menciptakan banyak perbedaan dan membudayakan bangunan opini subyektif, persial yang diragukan akan kebenarannya. Sehingga, terjadilah gesekan versus diantara masing-masing kelompok atau kelompok masrakat dengan pemerintah.

Gesekan antar kelompok masyarakat ataupun dengan pemerintah jika tidak diantisipasi sedini mungkin maka akan membentuk bias opini yang fanatik subyektif dan liar sehingga gesekan konflik sosial pun selalu terjadi yang ber-ulang-ulang dengan isu yang sama dan akan membentik opini public dalam Gerakan social lingkungan masyarakat⁴

(Cutlip, 2007) Memberikan pengertian tentang Hakikat Opini Publik merupakan Sekumpulan pandangan individu terhadap isu yang sama yang berhubungan dengan arah opini, pengukuran intensitas, stabilitas, dukungan informasional & dukungan sosial. Bagi sebagian kualisi sejumlah tokoh, opini dengan isu tertentu seringkali digunakan sebagai instrument ampuh dalam membentuk bangunan narasi subtektif, parsial dan memihak. Sehingga yang terjadi, sekerumpunan massa dengan mudah dikendalikan oleh isu kelompok tertentu.

Kasus hari ini, opini dan dari isu subyektif, parsial, dan sepihak yang tidak seimbang benar-benar membius disegala sector, baik dikalangan cendikiawan, birokrat pemerintah, ataupun dikalangan publik. Maka yang terjadi, pandangan dan pendapat mereka terhdap objek masalah menjadi fanatisme sepihak terhadap kelompok dan golongan tertentu.

Keberpihakan pada kelompok tertentu menimbulkan fanatik tinggi tentu menjadi salah satu masalah sebab dari dari stabilitas nasional terganggu. Kehawatiran masyarakat terhadap keamanan bernegara menjadi kegelisahan publik secara menyeluruh. Yang terjadi akhir-akhir ini, terjadi hal ketegangan sosial yang melahirkan versus antar kelompok atau dengan pemerintah, yang seharusnya perlu dijaga mengenai stabilitas nasional. Tetapi, fugur dari masing-masing kelompok berhasil membentuk bangunan narasi dan opini yang memunculkan banyak perpecahan dan kerugian dalam kelompok masyarakat bernegara.

Jika kita menoleh ke beberapa kejadian konflik di timur tengah dipicu dari konflik internal Negara tersebut. Sehingga, kelompok masyarakat sangat mudah untuk dikendalikan emosinya. Kemudian, yang terjadi adalah terhambatnya pembangunan nasional, terganggunya keamanan serta kesejahteraan publik menjadi korban atas isu dan opini publik sepihak yang sengaja diseting oleh sebageian publik figur. Harusnya, figur publik memberikan tauladan yang positif, optimistik yang mampu merencanakan serta mengimplementasikan kebijakan yang menguntungkan untuk publik. Sehingga, Negara menjadi kokoh, kermanan dan stabilitas ekonomi Negara terselamatkan.

Masalahnya, hari ini sebagian publik figur menggambarkan sikap ketidak dewasaan sehingga membentuk kekuatan versus yang kemudian melibatkan banyak kelompok yang dengan gampang emosinya dikendalikan serta terjebak dalam pandangan yang persial dan subyektif dan akhirnya terjadi sebuah konflik kekerasan, ujaran kebencian, hoax saling menjatuhkan diantara beberapa kelompok di Negara ini yang digerakkan oleh kekuatan massa yang militan terhadap salah satu pihak.

Kekuatan massa yang tinggi ini membentuk hal keseragaman pendapat yang kolektif sehingga hal yang belum tentu benar keberadaanya diperjuangkan demi mempertahankan eksitensitas dan status qou dari sebageian kelompok tersebut.

Pergerakan kekuatan massa/rakyat kita mengenalnya dengan kalimat *people power* yang disuarakan oleh publik figur yaitu dengan cara mengerakkan dan memanfaatkan kekuatan rakyat sebagai intrumen kedaulatan yang signifikan dalam memepertahankan pandangannya dan mengalahkan lawan politiknya.

Sebenarnya tidak ada yang keliru dari kalimat *People power* ini. Bertanda, bahwa atmosfer demokrasi di Indonesia bisa dinikmati oleh semua rakyat. Namun, menjadi salah ketika *people power* ini digunakan untuk menandingi kekuatan pemerintah yang sah sehingga menimbulkan krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah tanpa mengukur dengan dalam seberapa gagalnya pemerintah dalam menjalankan tugas kebijakannya.

People Power ini pernah terjadi di Negara ini yaitu pada era otoriterian soeharto, dimana terjadi kekuatan massa oleh mahasiswa di tahun 1998 yang bergerak secara massif terstruktur menkritik keras terhadap kondisi keadaan Indonesia yang pada saat itu sangat terjadi banyak pelanggaran HAM (Hak asasi manusia). Sehingga pada pucaknya presiden soeharto menyatakan mundur sebagai Presiden Republik Indonesia.

People power tersebut yang gerakkan oleh sekelompok massa dapat diterima alasan kritisnya oleh nalar akal sehat publik, karena memang terjadi sebuah kekacauan pemerintah yang signifikan, stabilitas nasional terancam, ekonomi Negara semakin melemah sehingga terjadi krisis moneter. Namun, jika dikembalikan pada isu hari ini tentang urgen nya gerakan *people power* yang di usung oleh beberapa publik figure dan pelaku politik memiliki sebuah pertanyaan yang perlu digali dan dipertajam mengenai sebab dan akibatnya. Karena, cirri dan indikator kegagalan pemerintah tidak seperti yang dulu pernah terjadi di zaman presiden Soeharto.

People power yang hari ini terjadi bagian dari ikhtiar ke kecewaan dari salah satu golongan masyarakat yang kecewa atas kinerja Komisi Pemilihan Umum karena diduga adanya intervensi pemerintah dalam memenangkan salah satu calon Presiden 2019.

Penyampian pendapat dengan melibatkan kekuatan massa merupakan ciri dan symbol bahwa demokrasi di Indonesia masih ada, setidaknya meyakinkan kepada publik bahwa Negara ini sedang menganut system demokrasi dan bukan feodalisme atau otoriterian sehingga menyampaikn pendapat dimuka umum dijamin keberadaannya oleh pemerintah Indonesia. Asal, tidak ada niatan makar didalmnya.

Ketidak puasn dari salah satu pihak meruapkan masalah publik yang tidak boleh dibiarkan terus berlanjut , karena ketidak puasn ini akan melahirkan gerakan frontal dan mobilisasi massa yang melahirkan gesekan antar kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Maka tentu, pihak keamanan selaku pihak yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin kewan dari stabilitas Negara agar terus berlanjut.

People power dan stabilitas nasional dua hal yang berbeda namun memiliki sisi ikatan yang signifikan. Artinya, jika keberadaan potensi gerakan peole power yang semakin besar maka stabilitas nasional memiliki potensi signifikan untuk terganggu. Setiap kelompok harusnya memiliki kesadaran yang tinggi untuk tidak melakukan inkonstitusinal dan diberikan ruang untuk menyampaikan ketidak puasannya melalui jalan hukum yang telah diberikan oleh pemerintah. Jika, ada kinerja KPU yang menyalahi aturan boleh digugat hasil hitungnya melalui Mahkamah Konstitusi.

Disisi lain kinerja Komisi Pemilihan Umum hari ini mendapatkan banyak pertentangan, ada yang pro dan ada yang kontra. Karena, kinerja yang profesional yang tidak memihak terhadap salah satu calon merupakan hal yang harus diwujudkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan kabar berita TV one pada tanggal 29 Mei 2019 jam 17.00 setidaknya ada beberapa publik figur yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan makar dan mengajak dengan narasi provokatif yang melibatkan kekuatan rakyat untuk melakukan aksi besar-besaran sebagai symbol ketidak puasn atas kinerja KPU yang dianggap curang. Maka tolak ukur kinerja dari birokrasi KPU penting untuk dikaji lebih mendalam, hal ini bertujuan agar publiki lebih dewasa dalam memahami penggiringan opini yang subyektif dan persial yang masih perlu dibuktikan kebenarannya atas isu yang terjadi sehingga tidak menimbulkan potensi konflik yang lebih besar antara kelompok masyarakat dengan pemerintah.

Tugas akademisi melalui karya dan tulisannya setidaknya mampu memberikan ulasan yang logis dan rasional serta mampu menjawab masalah konteks melalui perpaduan teori dan fakta dilapangan sehingga menemukan solusi yang matang ditinjau dari sudut pandang teori kinerja birokrasi KPU serta menjadi jawaban atas liarnya opini tentang gagalnya kinerja KPU di pemilu 2019.

Tulisan ini akan menguraikan indikator dan kinerja KPU melalui sudut pandang Dwiyanto pada buku Kebijakan Publik dengan judul Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analisi, setidaknya ada 5 indikator untuk mengukur kinerja Birokrasi. Dalam penulisan karya ilmiah ini ingin mengetahui dan mengungkap atas Urgency Isu Dugaan Penyalah gunaan Gerakan *People*

power (Sejumlah Tokoh) Terhadap Ketidak Puasan Kinerja KPU Pada Pemilu Tahun 2019 dengan mengulas kinerja KPU pada pemilu Tahun 2019.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Opini dan Isu Publik

Opini dan isu publik menjadi alat untuk menyampaikan informasi baik berupa permasalahan, prestasi atau kegagalan dari kinerja petugas publik. tentu, publik akan menerima informasi kejelasan dari permasalahan tersebut bergantung pada penyampaian petugas publik. Menurut William Dunn (1998), mengungkapkan bahwa kejadian sosial politik tidak lepas dari adanya keberadaan kondisi kebijakan sehingga terbentuk isu kebijakan yang menghasilkan sebuah produk yang dapat diperdebatkan baik tentang perincian pokok masalah, perdebatan dan perumusan kebijakan publik.

Dunn (1998) menambahkan bahwa perumusan kebijakan tidak hanya berbicara soal isu kebijakan yang mengandung kontroversial dan ketidak sepahaman atas kebijakan yang menghasilkan arah tindakan tang aktuan atau potesial, namun juga membahas mengenai sifat masalah-masalah dalam isu kebijakan publik.

Menurut Hogwood dan Gunn (1986), isu memiliki potensi mengenai peluang untuk melakukan tindakan positif yang menguntungkan bagi kelompok masyarakat kecil atau luas, namun disisi lain isu mengandung ancaman dan makna masalah yang sukar untuk dipecahkan. Dalam pandangan Alford dan Friendland (1985), isu diartikan sebagai salah satu kebijakan yang menawarkan solusi dari ketidak sepahaman diantara dua arah sehingga sebagai alternative untuk melakukan proses penyelesaian yang menciptakan sebuah kebijaksanaan yang bermanfaat dan kesadaran untuk melakukan sebuah proses perbaikan kedepannya.

Dalam kehidupan masyarakat isu diartikan sebuah perbedaan pendapat secara alamiah membentuk sebuah rumusan tentang paradigma, pendapat dan solusi (*policy action*) tentang masalah isu publik, dari kejadian isu ini kemudian dijadikan sebuah rumusan kebijakan pemerintah dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan yang akan diambil sehingga dijadikan sebuah agenda penting bagi pemerintah sebagai rujukan temuan masalah-masalah yang perlu diselesaikan dengan serius dan dengan pada waktu tertentu yang berdampak positif bagi publik.

Herabudin (2016:66) apabila dalam suatu kelompok tertentu berkeinginan kuat untuk melakukan aksi yang kuat dalam mempersoalkan adanya isu kebijakan tertentu sehingga dapat mempengaruhi terhadap agenda pemerintahan dengan menggerakkan sumberdaya yang ada maka sama halnya pada kelompok lain juga mengalami reaksi yang sama kuat dalam menyorot isu kebijakan pemerintahan. Maka terciptalah sebuah pandangan tentang keseimbangan baru yang lebih tinggi dari keadaan diawal dalam masalah isu public.

Solichin Abdul Wahab (2005:105) berbagai masalah isu kebijakan publik yang menyebabkan persaingan diantara masing masing kelompok yang mengandung gesekan yang sangat kuat, biasanya hanya ada beberapa isu yang perlu ditindak lanjuti, maka isu-isu tersebut termuat dalam agenda kebijakan yaitu dengan melalui cara sebagai berikut.

- a. Upaya dalam rangka mengambil kebijakan sendiri menjadi keharusan untuk berinisiatif dalam membuat regulasi dan mengambil keputusan, biasanya di Indonesia dilakukan oleh pemerintahan ditingkat keputusan Menteri dan presiden atau sebagainya.
- b. Adanya dorongan yang kuat untuk juga memengaruhi kebijakan pemerintahan misalnya organisasi massa, LSM, dan partai politik.
- c. Pemerintah memiliki lembaga penelitian dengan hasil penemuan-penemuan rasional dan teruji secara ilmiah yang terdapat dalam kehidupan dari data-data masyarakat. Misalnya di LIPI dan BPPT.
- d. Ada beberapa isu yang dibuat oleh seseorang dari luar pemerintahan misalnya isu yang digulirkan oleh amin rasi misalnya (Busang) sehingga isu ini bergulir semakin meluas dan menghasilkan Gerakan social bersekala besar yaitu perpidahan dari otoriterisme ke reformasi secara total.
- e. Pemerintah tentu memperhatikan pusat isu di media massa sehingga menjadi tuntunan bagi sebuah kebijakan pemerintah.
- f. Media massa yang mematangkan suatu isu sehingga menjadi pusat perhatian pemerintah.

Maka melihat dari beberapa isu kebijakan diatas terdapat dua jenis agenda kebijakan adalah *istitusal agenda* dan *systemic agenda*. *istitusal agenda* adalah pokok permasalahan mejadi isu yang serius ditangani oleh penguasa. Dilihat dari dua isu tersebut yang terjadi di Indonesia saat ini yang terjadi adalah dua isu tersebut, sehingga terdapat beberapa isu menimbulkan reaksi husus yang dapat menimbulkan gesekan dan konflik diantara penguasa dan pemangku pejabat publik yang menjadi publik figur

B. Hakikat dan Nilai Demokrasi

Herabudin (2016:15). Mengungkapkan bahwa demokrasi secara Bahasa adalah terdiri dari dua kalimat yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan, maka demokrasi adalah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada rakyat untuk juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara sehingga ia mengetahui hal-hal yang baik bagi majunya dari sebuah negara. Dalam istilah lain demokrasi yang berarti dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yang secara langsung kedaulatan ada ditangan rakyat tentu melalui diskusi publik, musyawarah yang melibatkan banyak kelompok.

Maka di negara-negara yang memiliki populasi dengan jumlah penduduk yang tinggi keberlangsungan demokrasi diwakili oleh wakil rakyat, merupakan orang-orang yang dipilih oleh rakyat untuk duduk dikursi pemerintahan sebagai media kepentingan rakyat dengan membawa amanah dan kepentingan rakyat, maka kepentingan yang bersifat pribadi harus ditanggalkan bahwa kepentingan publik merupakan nilai-nilai yang harus selalu diperjuangkan sebagai tuntunan bagi para wakil rakyat.

Berkaitan dengan pemahaman tentang ilmu kebijakan pemerintahan maka hakikat demokrasi merupakan nilai-nilai dasar bagi petugas publik atau pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik dengan melihat regulasi yang berlaku dengan tidak mengabaikan ketentuan yang ada, selalu berpikir demokratis dengan menjalankan otonomi daerah sebagai usaha

pemerintah dalam mengembangkan pemerintahan yang lebih maju dengan tetap melihat kesamaan dan kesetaraan dalam melayani masyarakat luas.

C. Kemunculan Istilah People Power dan Pengalaman People Power Di Sejumlah Negara di Dunia

People power bukan Gerakan yang baru disetiap negara, Gerakan ni sering dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau keseluruhan yang menghendaki atas rendahnya kepercayaan kepada pimpinan tertinggi sehingga masyarakat melakukan aksi besar-besaran untuk menuntu pimpinan mudur dari jabatannya karena dianggap melanggar institusi yan menyimpang.

Maka secara luas pengertian *People Power* adalah sebagai kekuatan masyarakat yang berusaha melawan terhadap ketidakadilan dan penyimpangan yang dilakuan pimpinan tertinggi yang disertakan protes terhadap kebijakan yang merugikan terhadap masyarakat luas, kritik terhadap kezaliman atau kesewenang-wenangan yang dilakukan pimpinan tanpa melihat kondisi yang terjadi pada masyarakat.

People power mulai dikenal saat demonstrasi massal dilakukan rakyat Filipina tahun 1986 dengan tujuan mengakhiri rezim Presiden Ferdinand Marcos. Sekitar tahun 2010 dan 2011, gerakan serupa kembali merebak dengan tujuan mengakhiri rezim otoriter dan anti-demokrasi terdapat beberapa negara di kawasan Arab, sering disebut Musim Semi Arab atau Arab Spring

1. Filipina

Ferdinand Edralin Marcos adalah pimpinan tertinggi atau presiden ke 10 di Filipna dalam masa pemerintahannya sangat dikenal oleh masyarakat Filipina yang rajin membangun dan merenovasi infrastruktur, manajemen keuangan negara yang normal atau beberapa pengambilan kebijakan luar negeri yang berpihak pada negara sendiri membuat masyarakat pada masa awal pemerintahannya terkagum, namun pada masa pemilihan selanjutnya ia terbukti melakukan kecurangan untuk menjadi menang sehingga membuat keuangan negara Filipina melemah serta adanya kekacauan stabilitas nasional yang mengganggu terhadap kenyamanan masyarakat luas filipina.

Dikutip dari media *Indopos*, marcos bukan hanya melakukan kecurangan pada pemilu di Filipina namun ditambah dengan isu dugaan kuat ia melakukan KKN, sehingga menambah para aktivis bergerak dan turun kejalan mengecam terhadap perbuatan marcos pada saat itulah kondisi kemandirian negara berubah carut marut ditambah lagi diberlakukannya oleh marcus sebagai hukum darurat militer pada th 1972, saat itulah sosok marcos dikenal sebagai sosok yang dictator.

Dari kejadian inilah menimbulkan banyak reaksi masyarakat yang dikenal dengan terjadinya revolusi EDSA (Epifano de los Santos Avenue, nama sebuah jalan di Metro Manila) atau gerakan *People Power*, Gerakan EDSA adalah Gerakan aksi damai oleh semua masuarakat Filipina yang dilakukan secara tertib dan aman dalam menurunkan rezim dictator Marcos.

Aksi *People Power* terus dilakukan oleh warga Filipina terlebih pada saat diculiknya senator pro demokrasi yaitu Benigno Aquino, Jr atau Ninno yang dalang dari penculikan dan pembunuhan tersebut adalah pemerintahan marcos, hal ini diungkapkan oleh istri nino yang mengancam meminta keadilan pada marcos atas kasus terbunuhnya senator pro demokrasi yang berpihak pada rakyat filipina dengan menghendaki keadilan bagi masyarakat.

Aksi ini begitu lama kejadiannya, namun massa tetap melakukan dengan kasi damai semngat bercerita dengan cara yang aman sehingga tidak terjadi anarkis massa namun dalam revolusi EDSA dengan melibatkan Gerakan *People Power* berhasil menggulingkan Marcos dari jabatan

kedudukan tertingginya pada tanggal 25 Februari 1986 dan melantik Corazon Aquino sebagai presiden perempuan pertama di negara Filipina.

2. Tunisia

Arab Spring di Tunisia, Gerakan ini diawali dengan dengan kejadian aksi pembakaran diri dari seorang penjual sayur dan buah protes keras terhadap rezim otoriter negaranya, kejadian ini dilakukan dipasar Tunisia sehingga memicu Gerakan yang semakain meluas dengan terjadinya kerusuhan pada ahir bulan desember tahun 2010 yang disebut dengan Revolusi Yasmin. Maka saat itu terjadilkan Gerakan *people power* dengan mendatangkan massa yang besar-besaran mengakibatkan presiden Zinal Abidin Ben Ali pimpinan tertinggi Tunisia melarikan diri ke Negara Arab Saudi pada tanggal 14 Januari 2011 silam.

Pada tahun 2011 bulan januari tanggal 17 terjadilkan pergantian kepemimpinan Tunisia kepada perdabna Menteri Mohamed Ghannouchi yang memegang alih kekuasaan pada masa kekosongan kepemimpinan di Tunisia, hingga saat ini tidak heran jika persoalan di Tunisia masih belum terselesaikan dengan baik, terlebih dalam persoalan keamanan dan stabilitas negaranya. Setelah perdana Menteri tersebut selesai masa tugasnya digantikan oleh Beji Caid Essebsi pada tanggal 27 Februari 2011 dan dilantik sebagai presiden pada tahun 2014. Namun hal yang mengejutkan pada publik Tunisia bahwa Essebsi sendiri berjanji tidak akan ikut mencalonkan kembali pada pemilu November 2019.

3. Mesir

Gerakan *People Power* di mesir ini menimbulkan reaksi yang cukup tinggi dari berbagai kalangan diawali dengan banyaknya angka orang hilang dan terbunuh akibat protes ini sehingga pada awal 25 Januari 2011 terjadilah hari kemarahan Presiden Husni Mubarak yang berkuasa puluhan tahun dipaksa untuk segera mundur dari jabatannya dan kemudian kepemimpinan diganti oleh kelompok elit militer, dan kemudian mereka menjamin pemilu yang demokratis dan mencabut situasi darurat yang berlangsung 30 tahun. Pada tanggal 02 juni 2012 mubarak terbukti bersalah telah melanggar aturan negara sehingga ia dijatuhi hukuman seumur hidup.

4. Libya

Kekuasaan dengan gaya diktator tanpa melihat perspektif kemanusiaan mejadi kebiasaan yang buruk bagi presiden Libya, Libya dipimpin oleh seorang Muammar Gaddafi yang cukup lama sejak 1969 sampai pada 2011. Ketidak mampuan presiden ini dalam memimpin negara Libya menyulut kemarahan masyarakat luas untuk melakukan demonstrasi yang besar-besaran sehingga terjadi banyak pertumpahan darah dan orang meninggal dimana-mana. Gaddafi melalui loyalisnya ahirnya kuawalahan menghadapi massa yang terus bertambah sehingga ia menjadi buronan atas kejahatan manusia pada bulan juni 2011.

Meski gaddafi sudah tewas ditangan bangsanya sendiri saat menjadi buron pada tanggal 20 oktober 2011, dan pemerintahan baru Libya telah dibentuk untuk mengembalikan situasi negara ini, namun nampaknya sampai hari ini peperangan terus terjadi antara simpatisan gaddafi yaitu militer khalifa haftar dengan pihak oposisi gaddafi.

5. Aljazair

Gerakan *people power* di Aljazair dimulai sejak tanggal 28 Desember 2010, Gerakan ini dilakukan atas ketidak mampuan pemimpinnya karena tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, mahalnya harga pokok sehingga memicu reaksi yang tidak terorganisir yang dilakukan oleh rakyat Aljazair. Kelompok oposisi pemerintah menyuarkan hak-haknya untuk segera mengembalikan kondisi ekonomi negaranya pada semula karena kondisi masalah ini mampu bertahan 19 tahun. Namun demonstrasi dan protes besar-besaran masih terjadi hingga bulan April tahun 2011.

Namun sampai di tahun 2014 tanggal 17 April yang keempat kalinya presiden Abdelaziz masih terpilih kembali, ditengah kekuatan *People Power* mempertahankan masalah yang masih belum kunjung selesai dan disisi lain pihak oposisi makin kuat.

Negara ini memiliki militer yang sangat kuat dalam melakukan intervensi terhadap kekuasaan di aljazair, hingga akhirnya dewan militer mengajukan rekomendasi kepada presiden aljazair untuk segera mundur dari jabatannya mengingat sudah berusia 82 tahun dan sudah tidak layak untuk memimpin negara tersebut, maka akhirnya pada tanggal 28 april 2019 mengakhiri masa kepemimpinannya selama 20 tahun menjabat.

6. Maroko

Maroko merupakan negara yang terbilang kecil di wilayah arab dengan memiliki system kenegaraannya adalah negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja Muhammad VI sejak 1999, negara ini cukup aman dan nyaman namun tergolong negara yang miskin secara politik diguncang setelah beredar isu di media *facebook* tentang seruan *people power* bersamaan dengan musim semi arab pada tanggal 20 Februari 2011, rakyat maroko melakukan aksi Gerakan *People Power* menuntut untuk adanya perubahan system pemerintahan politik yang lebih baik, rakyat menyebutnya sebagai hari kehormatan.

Namun dibalik Gerakan *People Power* ini yang semula dilakukan dengan damai berubah menjadi suasana mencekam saat banyaknya korban masa aksi yang tewas, sehingga raja menyatakan reformasi politik pada 10 Maret 2011.

Kesepakatan kontitusi dilakukan setelah selesai musim semi yang berisi tentang perjanjian bahwa raja wajib mengangkat perdana Menteri dari partai politik untuk menduduki perdana Menteri yang diperoleh dari suara terbanyak berbeda yang dari sebelumnya raja berhak mengangkat siapapun yang disukainya untuk menjadi perdana Menteri.

7. Oman

Musim semi arab mengakibatkan banyak kerugian politik bagi wilayah sekitaran arab, salah satunya adalah negara oman. Pada tahun 2011 negara ini turut dilanda gelombang musim semi sehingga mengakibatkan sultan oman mengambil keputusan untuk menyerahkan sebagian kekuasaan legislative pada tanggal 13 Maret 2011, kebijakan ini sebagai solusi atas terjadinya protes rakyat di beberapa wilayah yang menuntut akan perubahan system pemerintahan sehingga mampu mengkondisikan dan mengamankan akan terjadinya masalah yang lebih besar lagi.

Dengan kejadian tersebut sultan oman mengumumkan untuk menaikkan pembayaran kesejahteraan bulanan serta menaikkan bayaran pension bagi abdi negara, dengan kebijakan tersebut membuat sultan oman qaboos bin said menjadi pemimpin akhir di teluk yang

memberikan banyak kesejahteraan bagi rakyatnya pasca terjadinya kerusuhan yang terjadi di beberapa bagian besar dunia arab.

Dengan otoritas kebijakannya lalu sultan oman qabus, melakukan pemecatan kepada beberapa Menteri dan melakukan restrukturisasi cabinet dengan membuat kesepakatan tertigginnya dengan memberikan kekuasaan kepada dewan oman, yang mana sebelumnya kebijakan hanya dirumuskan oleh cabinet dan sultan setelah memimpin selama 40 tahun.

Sultan oman pada sebelumnya memiliki kekuatan otoriter mutlak untuk menunjuk sendiri pembentukan anggota dewan oman yang terdiri dari syura yang keanggotannya dipilih dari dewan negara namun setelah kebijakan baru sultan oman melimpahkan kepada dewan oman untuk ikut aktif terlibat dalam mengambil kebijakan dalam majunya negara oman tersebut.

8. Yaman

Yaman merupakan negara yang memiliki letak wilayah disekitar arab sehingga gelombang arab spring juga mengakibatkan stabilitas keamanan terancam, puncaknya terjadi Gerakan *People Power* di yaman yang menuntut presiden yaman Ali Abdullah Saleh untuk mundur dari jabatannya setelah 33 tahun berkuasa.

Angka kemiskinan di Yaman memasuki tahap parah, memicu masyarakat menuntut pergantian pemimpin. Ali Abdullah Saleh berulang kali menawarkan konsesi untuk meredakan aksi protes, mulai dari menjanjikan tidak akan mencalonkan diri kembali pada pemilu 2013 hingga mengumumkan referendum yang akan memisahkan kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Tanggal 27 Februari 2012, Saleh pun secara formal mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya Abdrabbuh Mansur Hadi. Yaman pun kembali membangun negara setelah berbulan-bulan aksi yang dipenuhi kekerasan.

9. Indonesia

Gerakan *People Power* juga terjadi di negara Indonesia pada tahun 1998 dimulai dari kekuasaan otoriter soeharto dengan membatasi aspirasi dari rakyat serta kebijakan sentralisasi yang tidak boleh seorangpun selain soeharto membuat kebijakan akhirnya terjadi protes besar-besaran, hilangnya banyak aktivis dan kekacauan politik negara yang semakin parah mengakibatkan negara indonesia berada dipuncak moneter yang semakin melemahnya nilai rupiah, kelaparan dan ketidakadilan terjadi dimana-mana.

Pada masa ini Gerakan tersebut benar-benar sangat massif sehingga menimbulkan banyak reaksi dari semua kelompok masyarakat khususnya mahasiswa yang menuntut agar presiden soeharto mundur dari jabatannya namun soeharto tetap teguh dalam kekuasaannya sehingga mengakibatkan kerusuhan antara militer pro soeharto dengan kelompok mahasiswa diberbagai wilayah di Indonesia.

Gerakan *People Power* ini bukan tanpa alasan sebab rakyat sudah merasa ketidakadilan menimpa padanya, kegiatan KKN yang dimotori oleh presiden soeharto memicu kemarahan rakyat untuk menuntut presiden soeharto untuk mundur dari jabatannya. Sehingga pada 1998 mahasiswa berhasil menduduki parlemen negara dan soeharto menyatakan mundur dari jabatannya.

D. Indikator Pengukuran Kinerja Organisasi Publik (KPU)

(Dwiyanto, 2009:228-229) mengungkapkan ada 5 indikator yang harus dipenuhi dalam kinerja birokrasi, di antaranya adalah:

1. Produktivitas. Indikator ini menggabungkan antara keberhasilan kinerja tingkat efisiensi dan efektifitas.
2. Kualitas pelayanan. Menjadi alat ukur yang sangat penting dalam kinerja pemerintahan, kualitas pelayanan yang baik akan memberikan dampak sisi positif bagi kepuasan para pengguna jasa dan barang publik di pemerintahan, seringkali pelayanan yang berkualitas adalah tolak ukur sederhana yang dilakukan oleh rakyat dalam rangka mengungkapkan kinerja pemerintahan.
3. Responsivitas. Upaya pemerintah dalam rangka memberikan segera usaha untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan masyarakat sehingga menjadi agenda program untuk segera direalisasikan sesuai dengan kebutuhan tiap masing-masing masyarakat.
4. Responsibilitas. Upaya pemerintah untuk mampu memenuhi keinginan rakyat agar pelaksanaan organisasi publik dapat terwujud berdasarkan aturan administrasi yang berlaku.
5. Akuntabilitas. Upaya yang ditunjukkan oleh petugas publik untuk berani bertanggung jawab dengan transparan dan bekerja untuk kepentingan publik.

METODOLOGI PENELITIAN

Peneliti dalam menyusun proposal ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan penelitian dengan mencermati beberapa fenomena mengenai isu ajakan *People power* (Sejumlah Tokoh) Terhadap Ketidak Puasan Kinerja KPU Pada Pemilu Tahun 2019 di media sosial lalu dilakukan beberapa analisis tentang indikator kinerja KPU dengan mengambil teori dari beberapa materi dan sumber yang terdapat dalam buku, data kualitatif menurut Sugiyono merupakan data-data yang bukan berbentuk angka (Sugiyono, 2006: 14).

Sedangkan focus penelitian ini terdapat lima indikator untuk mengukur kinerja Komisi Pemilihan Umum menurut Dwiyanto, 2009:228-229 yang meliputi Produktivitas, Kualitas pelayanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas.

PEMBAHASAN

1. Produktivitas

Pada pemilu 2019 yang diselenggarakan oleh Panitia Komisi Pemilihan Umum (KPU) diselenggarakan dengan cara serentak diantaranya adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten yang sebelumnya diselenggarakan secara terpisah menurut ketentuan jenjang waktu. Namun, pemilihan pada kali ini dilakukan secara serentak yang diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini, tentu dengan alasan yang rasional karena untuk menghemat biaya pemilu namun tidak

mengurangi dari pemelihan yang diselenggarakan secara serentak. Selain itu, kotak logistic KPU juga dibuat sederhana namun tidak mengurangi keamanan dari kegiatan pemilu.

Maka berdasarkan panitia KPU bahwa tujuan dari diselenggarakan pemilu secara serentak pada 19 April 2019, pemilihan serentak ini bertujuan agar negara lebih berhemat soal penggunaan anggaran sampai Rp 5 / 10 Triliun ungkap anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Alasan lain penyelenggaraan pemilu serentak ini tidak memakan waktu yang sangat lama sehingga tidak menjadi alasan bagi para pemilih untuk go out.

Disisi lain dengan diberlakukannya pemilu serentak ini agar penyelenggaraan pemilu serentak lebih efisien baik dari segi waktu maupun biaya, berdasarkan perhitungan Anggota DPR F-PDIP Arif Wibowo, pemilu serentak mampu menghemat dana sekitar Rp 150 triliun, atau sepersepuluh APBN dan APBD. (kumparan.com)

2. Kualitas Pelayanan

Kepuasan Publik dalam penyelenggaraan pemilu pada kali ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mengenali calon wakilnya sedalam-dalamnya, dengan segemen kampanye waktu yang cukup lama. Maka, calon wakil takyapun memiliki waktu yang cukup lama dari pendaftaran, masa kampanye, masa tenang sampai pada pelaksanaan pemilu. Sehingga, mereka memiliki kesempatan untuk menyampaikan sejelas-jelasnya mengenai tujuan dan maksud dari pencalonan dirinya.

Disisi lain pemilih diberikan kesempatan sebas-bebasnya untuk menilai, memahami dan memilih sesuai dengan kehendaknya, kriteria yang rakyat inginkan. Maka kesempatan ini sebagai wujud dari tujuan demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat peserta pemilih diseluruh lapisan masyarakat baik di kota, desa bahkan pelosok dan daerah pedalaman tertinggal untuk juga ikut aktif memilih calon wakil rakyatnya tanpa ada pengecualian dimasing-masing lapisan tersebut.

Maka untuk menjamin kepuasan kualitas pelayanan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU memiliki tugas untuk tidak ikut campur dan intervensi wilayah rakyat dalam memilih calon wakil rakyatnya serta menjaga kerahasiaan dari pilihan rakyat.

3. Responsivitas

Dalam penyelenggaraan pemilu serentak kali ini KPU juga sebagai pelaksana demokrasi, KPU melakukan sosialisasi kepada rakyat pemilih untuk bisa mengecek di situs KPU apakah dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Maka, hal ini menjadi tugas KPU untuk memberikan wadah kesempatan bagi rakyat pemilih untuk mengetahui bahwa dirinya sudah terdaftar menurut pencatatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Inisiatif ini merupakan bentuk respon KPU untuk terlibat massif untuk mengetahui jumlah hak pemilih tahun 2019 yang nanti pada penyelenggaraannya sesuai dengan data jumlah pemilih tetap, sesuai dengan hasil keputusann KPU bahwa pemilih tetap Indonesia bahwa dari hasil perbaikan ke-3 ada berdasarkan daftar pemilih tetap pemilu 2019 (DPTThp 3). Maka dalam (DPTThp 3) jumlah pemilih yang telah ditetapkan mengalami kenaikan yaitu

menjadi total jumlah 192.866.254 dari jumlah pada data jumlah pemilih (DPThp 2). Adapun rincian tersebut seperti table dibawah ini:

No	Lokasi Pemilih	Jumlah Pemilih
1	Pemilih Dalam Negeri	190.779.969
2	Pemilih Luar Negeri	2.086.285
Total Jumlah Pemilih		192.828.520

Sumber: Rekapitulasi KPU (JAKARTA, KOMPAS.com)

No	TPS	Jumlah TPS
1	TPS Dalam Negeri	809.699
2	TPS luar Negeri (Kotak suara keliling)	2.326
3	Pos	426

Sumber: Rekapitulasi KPU (JAKARTA, KOMPAS.com)

Tentu tujuan dari Respon yang tinggi dari KPU akan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap penyelenggaraan pemilu dan mencegah kemungkinan terjadinya golput pada pemilu 2019.

4. Responsibilitas

Dalam penyelenggaraan pemilu serentak ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki agenda , teknis dan prosedur pelaksanaan pemilu yang disetujui bersama, sesuai dengan teknis tersebut pemilu yang diselenggarakan Panitia KPU mulai dari daftar partai sebanyak 14 partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu adalah seperti table dibawah ini:

No	Nama Partai	Nomer Urut
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2	Partai Gerindra	2
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
4	Partai Golkar	4
5	Partai Nasdem	5
6	Partai Garuda	6
7	Partai Berkarya	7
8	Partai Keadilan Sejahtera	8
9	Partai Perindo	9
10	Partai Persatuan Pembangunan	10
11	Partai Solidaritas Indonesia	11
12	Partai Amanat Nasional	12
13	Partai Hanura	13
14	Partai Demokrat	14

Upaya memberikan respon bagi publik maka KPU telah merancang agenda yang optimal yaitu pada 17 Februari 2018 dihimbau bagi seluruh peserta politik untuk tidak melakukan kampanye sampai pada waktu yang ditentukan yaitu 23 September 2018, dan selanjutnya berdasarkan atas agenda kebijakan KPU baru akan dimulai kampanye kembali pada tanggal 23 September – 13 April 2019.

Dari beberapa agenda pelaksanaan pemilu yang dirumuskan oleh KPU telah memenuhi syarat yang baik, perencanaan yang terorganisir dengan rapi dan terstruktur sehingga tidak ada saling tumpang tindih antara agenda kegiatan satu dengan yang lainnya.

Agenda yang sistematis tersebut sebagai bentuk wujud yang jelas sehingga para pemilih dapat dengan gampang melaksanakan pemilu tahun 2019 sesuai dengan mekanisme dan agenda yang telah ditentukan oleh petugas KPU.

Hal tersebut menandakan bahwa upaya responsibilitas sebagai upaya dalam memberikan kejelasan tindakan bagi publik dapat terwujud dengan optimal, sehingga pemilu ini dapat berjalan dengan agenda yang diinginkan dan direncanakan semula.

Sebagaimana agenda yang telah dirumuskan bersama beberapa seperti table dibawah ini.

No	Waktu	Nama Agenda
1	17 Agustus 2017 s/d 31 Maret 2019	Perencanaan program dan anggaran
2	1 Agustus 2017 s/d 28 Februari 2019	Penyusunan peraturan KPU
3	17 Agustus 2017 s/d 1 April 2019	Sosialisasi
4	3 September 2017 s/d 20 Februari 2018	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
5	19 Februari 2018 s/d 17 April 2019	Penyelesaian sengketa penetapan partai politik peserta pemilu
6	19 Januari s/d 21 Agustus 2019	Pembentukan badan penyelenggara
7	17 Desember 2018 s/d 18 Maret 2019	Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
8	17 April 2018 s/d 17 April 2019	Penyusunan daftar pemilih di luar negeri
9	17 Desember 2017 s/d 6 April 2018	Penataan, dan penetapan daerah pemilihan (dapil)
10	26 Maret 2018 s/d 21 September 2018	Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serta pencalonan Presiden dan wakil presiden
11	20 September 2018 s/d 16 November 2018	Penyelesaian sengketa penetapan pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pencalonan presiden dan wakil presiden
12	24 September s/d 16 April 2019	Logistik
13	23 September 2018 s/d 13 April	Kampanye calon anggota DPR, DPD, DPRD dan pasangan calon presiden dan wakil presiden
14	22 September 2018 s/d 2 Mei 2019	Laporan dan audit dana kampanye
15	14 April 2019 s/d 6 April 2019	Masa Tenang
16	8 April 2019 s/d 17 April 2019	Pemungutan dan penghitungan suara

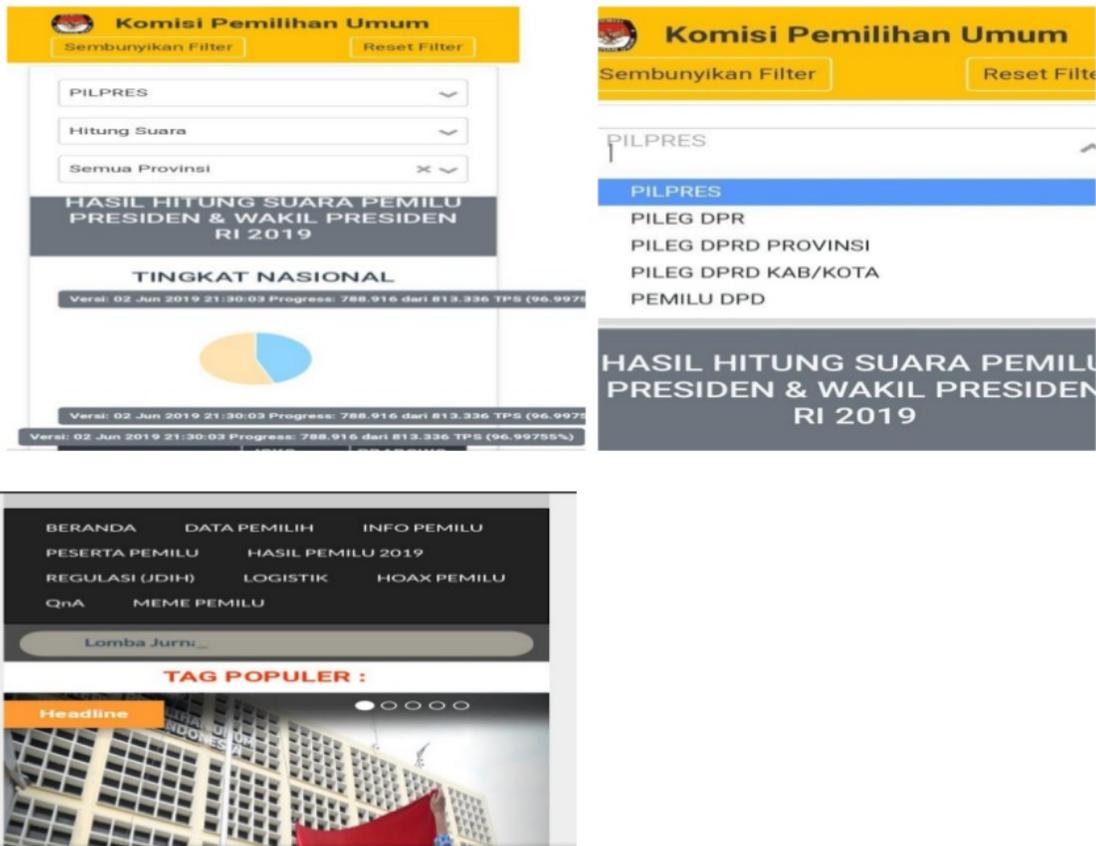
17	18 April 2019-22 Mei 2019	Rekapitulasi penghitungan suara
18	23 Mei 2019-15 Juni 2019	Penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden
19	Juli-September 2019	Peresmian keanggotaan
20	Agustus-Oktober 2019	Pengucapan sumpah/janji.

Sumber. laman <https://infopemilu.kpu.go.id>

5. Akuntabilitas

Dalam memberikan kepuasan kepada publik sebagai peserta pemilih. KPU, memiliki tugas pertanggung jawaban untuk memberikan proses keterbukaan informasi seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk juga bisa memantau secara jelas atas proses perkembangan peroleh suara secara terbuka.

Untuk menambah keyakinan rakyat pemilih dari kegiatan penyelenggaraan pemilu yang transparan, kami sajikan gambar-gambar yang diambil dari situs KPU atas hasil penghitungan suara dan konten yang berisi mengenai segala informasi yang dibutuhkan publik tentang proses pemilu sebagai berikut ;



Sumber.kpu.go.id

PENUTUP

Kesimpulan

1. Produktivitas

Ajakan *people power* tidak berdasar dan tidak diterima secara rasional menurut pengetahuan. Karena, jika diukur dari sudut pandang produktivitas kinerja KPU. Tentu, ajakan *people power* sejumlah tokoh tersebut terbantahkan. Setidaknya, kita mengetahui kinerja KPU dengan inisiatif pemilu serentak ini akan menghemat biaya pemilu secara signifikan. Selain itu, pemilu kali ini mengajarkan pengalaman kepada rakyat tentang kesadaran berdemokrasi

2. Kualitas Pelayanan

Komisi Pelayanan Umum (KPU) memberikan kebebasan dan kesempatan seluas-luasnya kepada Partai Politik dan calon legislator untuk mengenalkan profilnya kepada pemilih, dan pemilih diberikan seluas-luasnya untuk menggunakan hak suaranya sebagai pemilih sesuai dengan keyakinannya tanpa intervensi dan paksaan dari pihak manapun.

Ajakan *People Power* mengandung misi terselubung, karena hanya mempertentangkan perolehan suara dari calon presiden, sedang disisi lain tidak mempertentangkan hasil perolehan suara dari calon legislator (dari partai koalisi) yang menang. Dari paparan sejumlah tokoh politik menyampaikan jika capresnya yang diusung menang tidak akan mempermasalahkan hasil perolehan suara, namun jika yang menang adalah capres lain kemudian akan mempertentangkan hasil perolehan suara tersebut

3. Responsivitas

Rakyat Indonesia semakin tertarik untuk menggunakan hak suaranya karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat responsif dalam menyediakan media sebagai pusat informasi dari penyelenggaraan pemilu serentak 2019, maka rakyat pemilih akan mengetahui apakah dirinya sudah menjadi pemilih tetap yang tercatat di media KPU atau tidak.

Sehingga ajakan *People power* terbantahkan dengan kinerja KPU, karena KPU telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat, maka rakyat pun berfikir bahwa terselenggaranya pemilu pada kali ini dirasa sangat penting bagi hak suara yang dimiliki oleh rakyat Indonesia.

4. Responsibilitas

Tentu mekanisme dan agenda prosedur yang dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat detail dan tidak memihak kepada salah satu kelompok, terbukti tidak ada gugatan dan kritik mulai dari pendaftaran hingga pemilihan, namun kritik itu datang hanya pada saat perolehan suara yang **di lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)**. Maka, **hal** ini sangat tidak kooperatif, harusnya jika memang ada mekanisme yang keliru sudah bisa diidentifikasi dari pelaksanaan pemilu dari awal sampai akhir.

Namun ajakan *People power* tersebut baru ada setelah penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), padahal kelompok yang menggugat atas

perolehan suara tersebut menyetujui dan mengikuti serta mentaati prosedur yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

5. Akuntabilitas

Dalam memberikan pertanggung jawaban yang total kepada rakyat Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan akses informasi mengenai perolehan suara dari pemilihan Pilpres, DPRD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, sampai DPRD Kabupaten. Semuanya, bisa dilihat melalui situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kpu.go.id. tidak hanya itu, proses penghitungan pun dilakukan secara manual ditingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai provinsi. Hal ini dilakukan untuk memberikan pertanggung jawaban secara maksimal kepada semua publik bahwa proses penghitungan suara dilakukan secara transparan dan mencegah terjadinya kemungkinan potensi kecurangan.

Maka ajakan *People power* yang berujung anarkis tentu menyalahi mekanisme dan aturan yang ada, karena pemerintah pun memberikan kepada semua pihak jika tidak puas dengan hasil perolehan suara bisa digugat melalui jalur hukum yaitu dengan mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi.

Saran

1. Produktivitas

Tidak ada suatu pekerjaan yang sempurna sesuai dengan rencana di awal, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah dengan sungguh-sungguh menuangkan ide dan gagasan sebagaimana pemilu serentak agar lebih efektif dan efisien baik dari waktu penyenggaraan pemilu, kebutuhan logistic, fasilitas dan anggaran yang lebih irit.

Disisi lain seluruh warga Indonesia hendaknya tidak terburu-buru menilai kegagalan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan pemilu tanpa melakukan pengkajian lebih mendalam kinerja yang sudah ditunjukkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

2. Kualitas Pelayanan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan tugasnya dengan tuntas. Hal ini perlu apresiasi dari publik dimana pekerjaan KPU sangat berat. Mengingat jumlah penduduk yang sangat banyak dan jangkauan wilayah yang sangat luas. Namun, KPU berhasil memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pemilih baik di dalam negeri ataupun luar negeri.

3. Responsivitas

Respon yang begitu tinggi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mensukseskan kegiatan pemilu serentak perlu adanya timbal balik yang positif dari publik, agar kegiatan pemilihan yang nantinya diselenggarakan dipemilu-pemilu selanjutnya tertanam sebuah motivasi yang tinggi untuk terus melakukan evaluasi dalam mencapai pemilu yang demokratis, jujur dan adil.

4. Responsibilitas

Mekanisme dan prosedur yang direncanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan tanpa alasan yang jelas, karena dari tahap demi tahap pelaksanaan pemilu tersebut memberikan kesempatan bagi calon dan pemilih untuk juga ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pemilu serentak.

5. Akuntabilitas

Pertanggung jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tinggi akan memberikan proses pentingnya berdemokrasi, tentu Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan selalu mengevaluasi dari hal-hal yang kurang pada pemilu kali ini akan menjadi materi perbaikan pemilu dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara
- Alford, Robert. R, and Roger Friedland. 1985. *Powers of Theory, Capitalism, the State, and Democracy*. Cambridge University Press.
- Chitlip, Scott M. et al, 2007. *Effective public Relation*, Edisi IX, cetakan ke-2. Jakarta : Kencana
- Dunn, N. William. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus 2003. *Reformasi Pelayanan Publik: Apa yang harus dilakukan, policy*, Policy Brief. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Herabudin. 2016, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*. Pustaka Setia. Bandung
- Hogwood, Brian W, and Lewis A. Gunn. 1986, *Policy Analysis for the Real World*, Oxford University Press.
- Indiahono, Dwiyanto, 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Penerbit Gava Media.
- Kliffins, Frank. 2005, *Public Relations*, Jakarta, Erlangga.
- Prescot, S.C and G Dunn. 1959. *Industrial Microbiology*. The AVI Publishing, Company Inc, Westport-Connecticut.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung

Sumber Media Sosial

Jakarta, KOMPAS.com

Kabar berita TV One pada tanggal 29 Mei 2019 jam 17.00

U.go.id

<https://www.amazine.co/39449/apa-itu-people-power-fakta-sejarah-informasi-lainnya/>
<https://kumparan.com/@kumparannews/memahami-lagi-alasan-pilpres-dan-pileg-digelar-serentak-tahun-2019-1542495076123429491>
<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/28/08350381/ini-tahapan-dan-jadwal-lengkap-pemilu-2019?page=2>

Cek Plagiasi 15-06-2020

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unisbablitar.ac.id Internet Source	2%
2	rakyatindependen.co.id Internet Source	1%
3	id.m.wikipedia.org Internet Source	1%
4	www.scribd.com Internet Source	1%
5	kumparan.com Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1%
7	pt.scribd.com Internet Source	<1%
8	ojs.unr.ac.id Internet Source	<1%
9	etheses.whiterose.ac.uk Internet Source	<1%

10	detiknusanantara.com Internet Source	<1%
11	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1%
12	madethoughts.home.blog Internet Source	<1%
13	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	<1%
14	journal.unismuh.ac.id Internet Source	<1%
15	Submitted to Victoria University of Wellington Student Paper	<1%
16	utamanews.com Internet Source	<1%
17	ejournal.upnjatim.ac.id Internet Source	<1%
18	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1%
19	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1%
20	pt.slideshare.net Internet Source	<1%
21	media.neliti.com Internet Source	<1%

22

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography On